



**PENGARUH PENGANGGURAN TERDIDIK DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Di Tulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

FITRIA JULITA
NIM: 2130402028

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1447H /2025M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Julita
NIM : 2130402028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Fitria Julita
NIM. 2130402028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Fitria Julita NIM 2130402028** Dengan Judul **“Pengaruh Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A. Ek., CIFA
NIP. 199011042019032008

Batusangkar, 30 Juli 2025
Pembimbing






Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag
NIP. 196310191992031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Fitria Julita NIM 2130402028** judul: **"Pengaruh Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam"** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 196310191992031004	Ketua Sidang/ Pembimbing		21/8/2025
2.	Husni Shabri, M.Si NIP. 197703132023211008	Penguji 1		26/8/2025
3.	Mohammad Aliman Shahmi, M.E NIP. 199308292022031002	Penguji 2		27/08/2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Fitria Julita, NIM 2130402028. Judul Skripsi “Pengaruh Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat”. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran terdidik dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa time series yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang struktur yang menggunakan data berupa angka untuk menganalisis fenomena tertentu, dengan tujuan menguji hipotesis dan melihat hubungan antar variabel melalui perhitungan statistik. Teknis analisis data menggunakan uji statistic yang diolah dengan menggunakan SPSS 26 mencakup Analisa regresi linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji hipotesis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial Pengangguran Terdidik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengidentifikasi bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dapat menekan angka kemiskinan. Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: Pengangguran Terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Ekonomi Islam, Provinsi Sumatera Barat

ABSTRACT

Fitria Julita, NIM 2130402028. Thesis Title "The Influence of Educated Unemployment and Human Development Index (HDI) on Poverty in West Sumatra Province". Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Islamic University of Negri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

This study aims to analyze the effect of educated unemployment and the Human Development Index (HDI) on poverty in West Sumatra Province from an Islamic economic perspective. The research method employed is quantitative with secondary time series data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Quantitative research was chosen because it objectively illustrates the relationship between variables using numerical data with the purpose of testing hypotheses. Data analysis was conducted using SPSS 26 software, which includes multiple linear regression, classical assumption tests, coefficient of determination, and hypothesis testing.

The results of the study show that partially, educated unemployment has a significant effect on poverty in West Sumatra Province. The Human Development Index (HDI) also affects poverty, indicating that improvements in human quality through education, health, and a decent standard of living can reduce poverty rates. Furthermore, simultaneously, educated unemployment and HDI have a significant effect on poverty in West Sumatra Province. These findings illustrate that increasing the quality of human resources must be accompanied by the availability of productive job opportunities in order to sustainably reduce poverty.

Keywords: Educated Unemployment, Human Development Index (HDI), Poverty, Islamic Economy, West Sumatra Province.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
G. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Kemiskinan	12
2. Pengangguran Terdidik.....	28
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	35
B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Kerangka Berfikir	46
D. Hipotesis	46
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C. Sumber Data	49

D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatra Barat	55
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	55
2. Topografi	56
3. Geologi.....	57
4. Sejarah Sumatra Barat	58
5. Demografis Sumatra Barat.....	59
6. Sosial Budaya di Sumatera Barat.....	60
7. Pendidikan	60
8. Kesehatan.....	61
9. Kepariwisataaan.....	61
B. Hasil Penelitian.....	62
1. Uji Asumsi Klasik.....	62
2. Uji Regresi Linier Berganda	65
3. Koefisien Determinasi (R ²)	67
4. Uji Hipotesis	67
C. Pembahasan	70
1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terdidik (X1) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	70
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat	73
3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembngunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat	75
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kemiskinan, Pengangguran terdidik, Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sumatra Barat tahun 2015 – 2024 (persen).....	6
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	48
Tabel 4. 1 Uji Normalitas.....	62
Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi.....	64
Tabel 4. 4 Uji Regresi Linier Berganda	65
Tabel 4. 5 Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	68
Tabel 4. 6 Uji Signifikan Simultan (Uji f)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas	64
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mubyarto (2004), kemiskinan dapat dimaknai sebagai keterbatasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pandangan lain, kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan sosialnya kurang menyediakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau keluar dari kondisi rentan tersebut (Cahyat 2007).

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Salah satu persoalan ekonomi yang kerap dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, di mana kebutuhan primer maupun sekunder manusia tidak terbatas, sedangkan ketersediaan sumber daya alam terbatas. Sebagai persoalan sosial, kemiskinan selalu menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Islam membahas berbagai tema penting yang berfokus pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan yang mereka alami. (Istan, 2017)

Dalam perspektif Ekonomi Islam, isu kemiskinan dan pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga terkait dengan aspek moral, sosial, dan spiritual. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan dapat melemahkan semangat kerja, menurunkan produktivitas, dan bahkan menimbulkan kemunduran peradaban. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh distribusi sumber daya yang adil, produktivitas tenaga kerja, serta peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya tanggung jawab sosial melalui

mekanisme zakat, infaq, dan sedekah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang berarti bahwa setiap individu dituntut untuk produktif dan bekerja keras demi kesejahteraan serta membantu sesama. Dalam konteks ini, tingginya angka pengangguran terdidik dan ketimpangan distribusi hasil pembangunan menjadi perhatian serius dalam ekonomi Islam karena dapat menyebabkan stagnasi sosial dan memperburuk kemiskinan yang struktural.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), teori kekuatan memenuhi kebutuhan dasar (basic need method) digunakan ketika menakar kemiskinan. Berdasarkan metode ini indikator dipakai, yakni: Population Index (HCI), ialah persentase rakyat miskin di bawah Garis Kemiskinan, dan Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan, yakni ukuran kesenjangan, dalam outcome masyarakat miskin relative terkait garis kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, dimana nilainya memberikan visualisasi tentang distribusi outcome masyarakat miskin.(BPS Sumbar)

Tingkat kesejahteraan rumah tangga di Sumatera Barat tidak lepas dari dinamika garis kemiskinan (GK) dan kebijakan upah minimum. Garis kemiskinan menjadi batas pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar siapa pun dengan pengeluaran di bawah batas ini dikategorikan miskin. Pada Maret 2024, BPS Sumatera Barat menetapkan GK sebesar Rp708.416 per kapita per bulan, dan proporsi penduduk miskin mencapai 5,97% atau sekitar 345,73 ribu orang. Namun, komposisi GK masih didominasi komponen makanan (sekitar 75,92% pada September 2024), mengindikasikan rapuhnya ketahanan konsumsi rumah tangga terhadap gejolak harga pangan. Ketika harga pangan naik lebih cepat daripada penyesuaian upah, rumah tangga berupah minimum rentan jatuh ke bawah GK terutama pekerja informal yang tidak sepenuhnya terlindungi oleh regulasi upah minimum. Hal ini memperlemah efek penurunan kemiskinan

yang dicapai secara agregat dan menciptakan saku-saku kerentanan baru di wilayah dengan biaya hidup relatif lebih tinggi. (BPS Sumbar,2024)

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sosial, seperti terjadinya isolasi sosial, ketergantungan pada pihak lain, dan tidak adanya kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang layak. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh minimnya uang atau rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti rendahnya pendidikan, buruknya kondisi kesehatan, kerentanan terhadap ancaman dan tindakan kriminal, ketidakmampuan menghadapi kekuasaan, serta keterbatasan dalam menentukan arah hidup sendiri. (Ali, 2015)

Beberapa faktor yang memengaruhi naik turunnya angka kemiskinan antara lain: pertama, tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula pengetahuan dan keterampilannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas pada kelompok miskin sering kali disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan. Kedua, indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat. IPM berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena kualitas hidup yang baik akan mendukung penurunan jumlah penduduk miskin. (Adiwarman, 2010)

Negara berkembang seperti Indonesia, pengangguran lebih sering terjadi pada kelompok usia muda serta mereka yang memiliki pendidikan, yang sering disebut sebagai pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki pekerjaan. Fenomena ini sering terjadi di negara berkembang, dimana tingkat sekolah yang tinggi dianggap mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, namun kenyataannya malah berbanding terbalik, mereka terjebak dalam angka pengangguran. (Imam, 2016)

Indonesia, fakta menunjukkan bahwa pengangguran lebih banyak didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, yaitu

lulusan minimal SMA. Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah pengangguran terdidik tertinggi terdapat di wilayah Kepulauan Jawa dengan total 251.949 orang, disusul oleh Pulau Sumatera dengan 152.949 orang. Sementara itu, jumlah terendah tercatat di wilayah Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 23.490 orang. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan jenjang pendidikan terdapat pada lulusan Universitas (DIV/S1/S2/S3) dengan persentase 17,48 persen, sedangkan yang terendah berada pada kelompok yang tidak menamatkan Sekolah Dasar, yaitu 9,00 persen. Lulusan pendidikan tinggi seharusnya mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan negara, namun kenyataannya, sebagian dari mereka justru masuk dalam kategori pengangguran terdidik. Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula harapan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditempuh. (BPS Sumbar)

Salah satu penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik adalah tingginya jumlah angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik, yang berarti semakin baik kualitas tenaga kerja, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pengangguran di kalangan lulusan berpendidikan (Nabila, 2018).

Namun, masih banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur akibat tidak sesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Penelitian sebelumnya mendukung temuan ini antara lain studi Istifaiyah (2015) menyatakan bahwa pengangguran terdidik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian Oktaviana et al.(2021) menunjukkan pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran, khususnya pengangguran terdidik, terhadap kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada konteks wilayah, periode penelitian, serta faktor lain yang turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif multidimensional, pengukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari kekurangan pendapatan, tetapi juga dari terbatasnya kapabilitas manusia (*human capabilities*). Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga dimensi pokok dalam IPM meliputi kesehatan dan umur panjang, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi hidup layak dinilai dari kemampuan daya beli masyarakat. Sementara itu, dimensi kesehatan diukur menggunakan indikator angka harapan hidup. Kualitas hidup yang baik menjadi faktor pendukung berkurangnya jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi nilai IPM, semakin mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (UNDP HDR, 2010)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolok ukur pencapaian suatu negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ukuran ini menggabungkan tiga aspek utama, yaitu pendidikan, pendapatan, dan kesehatan (Todaro & Smith, 2011). Menurut Ginting, pembangunan manusia di Indonesia erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) umumnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan penurunan IPM cenderung diiringi oleh meningkatnya angka kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, peningkatan IPM tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya tingkat kemiskinan. (Dewi, 2017)

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga indikator utama, yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak. Sementara itu, konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0–100,0. Klasifikasinya terdiri dari: kategori sangat tinggi dengan nilai IPM di atas 80, kategori tinggi dengan nilai 70–80, kategori sedang dengan rentang nilai 60–70, dan kategori rendah dengan nilai di bawah 60. (BPS, 2015)

Tabel 1. 1
Kemiskinan, Pengangguran terdidik, Indeks Pembangunan manusia di
Provinsi Sumatra Barat tahun 2015 – 2024 (persen)

Tahun	Kemiskinan	Pengangguran Terdidik		IPM
		Diploma	Universitas	
2015	6.71	7.22	5.98	69.98
2016	7.09	5.03	4.54	70.73
2017	6.87	6.86	5.25	71.24
2018	6.76	6.00	5.88	71.73
2019	6.75	5.95	5.64	72.39
2020	6.56	8.08	7.35	74.29
2021	6.63	5.87	5.98	74.56
2022	6.04	4.59	4.80	75.16
2023	5.95	4.79	5.18	75.64

Sumber: www.sumbar.bps.go.id

Terdapat kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan. Menurut Teori Modal Manusia yang dikembangkan oleh Gary Becker, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan keluar dari kemiskinan (Farah, 2014). Akan tetapi, data di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pengangguran terdidik justru tetap tinggi, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 69,98 pada tahun 2015 menjadi 75,64 pada tahun 2023. Bahkan pada tahun 2023, angka pengangguran untuk lulusan universitas kembali naik menjadi 5,18%, setelah sempat turun di tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan penyerapan tenaga kerja, dan investasi pendidikan belum memberikan dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan, yang justru hanya turun sedikit dari 6,04% di tahun 2022 menjadi 5,95% pada tahun 2023. Temuan ini didukung oleh penelitian terbaru (Arimbi, 2014) yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja membuat pengangguran terdidik tetap tinggi,

meski kualitas pendidikan meningkat. Oleh karena itu, kesenjangan antara harapan teori dan realita empirik inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengangguran terdidik dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatra Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang menarik, terutama dalam hal angka pengangguran terdidik dan tingkat kemiskinan yang fluktuatif. Meskipun secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatra Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kenyataannya angka kemiskinan tidak serta-merta mengalami penurunan yang signifikan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terdidik juga tetap tinggi dalam kurun waktu yang sama, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan dan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan penyerapan tenaga kerja, dan investasi pendidikan belum memberikan dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan, yang justru hanya turun sedikit dari 6,04% di tahun 2022 menjadi 5,95% pada tahun 2023. Temuan ini didukung oleh penelitian terbaru (Arimbi, 2014) yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja membuat pengangguran terdidik tetap tinggi, meski kualitas pendidikan meningkat. Oleh karena itu, kesenjangan antara harapan teori dan realita empirik inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengangguran terdidik dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengangguran terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengangguran terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia memengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut. Dari pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul berikut : ***“Pengaruh Pengguran***

Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Dalam Perspektif Islam”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah – masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan tapi masih termasuk tinggi di bandingkan dengan Provinsi yang lain
2. Tingginya tingkat pengangguran terdidik akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan
3. Pengaruh Tingkat Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
4. Pengaruh tingkat pengangguran terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

C. Batasan Masalah

Demi memudahkan dan menyelamatkan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpan dari menyimpang dari tema, maka penulis menitik beratkan pada:

1. Pengaruh tingkat Pengangguran Terdidik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
3. Pengaruh tingkat Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalm penulisan proposal skripsi ini:

1. Apakah pengangguran terdidik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?

2. Apakah IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah pengangguran terdidik dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Maka berdaarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh signifikan Pengangguran Terdidik terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
2. Menganalisis pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
3. Menganalisis pengaruh signifikan pengangguran terdidik dan indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta menjadi penerapan dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah khazanah pengetahuan terkait pengaruh pengangguran terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang dalam membuat kebijakan terutama dalam pembangunan ekonomi.
 - c. Manfaat Prakmatis, Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah bagi perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap maksud penulis. Oleh karena itu, perlu dijabarkan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian ini, antara lain:

Pengangguran terdidik (X1) merujuk pada jumlah pencari kerja yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA atau lebih tinggi. Termasuk di dalamnya adalah individu berpendidikan SMA ke atas yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari kerja karena merasa tidak mampu (bukan disebabkan cacat fisik), maupun mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum memulainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2) merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia, baik dari aspek fisik seperti kesehatan dan kesejahteraan, maupun aspek nonfisik seperti intelektualitas. IPM menjadi indikator penting untuk melihat dampak kinerja pembangunan suatu wilayah karena mencakup dimensi yang luas, meliputi kualitas penduduk dalam hal harapan hidup, tingkat intelektualitas, dan standar hidup yang layak.

Kemiskinan (Y) Kemiskinan absolut merupakan kondisi yang mencerminkan keterbatasan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Situasi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah permasalahan global yang dipahami secara beragam—sebagian melihatnya secara subjektif dan komparatif, sebagian menilainya dari sisi moral dan

evaluatif, sementara lainnya memahaminya melalui sudut pandang ilmiah yang telah terstruktur.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diartikan bahwa maksud dalam judul ini proposal skripsi ini adalah suatu kajian kondisi pengaruh pengangguran terdidik dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Sumatra Barat tahun 2015-2023.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat multidimensi, di mana kebutuhan primer dan sekunder manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam yang tersedia bersifat terbatas. Sebagai isu sosial, kemiskinan selalu menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Islam membahas berbagai tema penting yang menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi serta mengentaskan kemiskinan yang mereka hadapi. (Istan, 2017)

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar sekaligus tantangan besar bagi suatu bangsa yang harus segera ditangani. Masyarakat miskin umumnya memiliki penghasilan yang tidak memadai, bahkan ada yang sama sekali tidak berpenghasilan. Mereka cenderung memiliki keterbatasan dalam kemampuan berusaha dan akses terhadap kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan berkaitan dengan kekurangan materi dan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan, penderitaan, atau kesulitan dalam menjalani kehidupan. Kelompok miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya akibat rendahnya penghasilan. (Fatmawati, 2022)

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum guna hidup layak, yang mencakup kebutuhan pangan maupun nonpangan. Pengganti yang dipakai dalam memastikan dimensi dari sesuatu kemiskinan merupakan dengan menyamakan tingkatan besaran mengkonsumsi dengan penumpukan

duit yang dibelanjakan orang dalam sebulan ataupun garis kemiskinan. Bila tingkatan konsumsi seorang terletak dibawah jumlah pada umumnya mengkonsumsi wajar, bisa dibilang tercantum dalam jenis miskin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak tidak terpenuhi. Hak-hak dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman atau tindakan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. (Tarigan, 2005)

Meskipun isu kemiskinan telah menjadi sorotan dan bahan pembahasan di berbagai forum, baik nasional maupun internasional, secara realistis dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak pernah benar-benar teratasi, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu menekan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini mengindikasikan adanya kekeliruan dalam memahami, merumuskan, maupun mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin.

b. Macam – Macam Kemiskinan

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan pokok minimum, seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan.

2) Kemiskinan Relatif

Ukuran relatif mengukur kemiskinan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kesejahteraan. Kondisi ini di pengaruhi kebijakan

pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

3) Kekurangan Kultural

Kekurangan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai dampak dari perilaku dan kebiasaan individu atau kelompok masyarakat yang umumnya berakar pada adat atau tradisi, di mana mereka cenderung enggan menyesuaikan pola hidupnya dengan tata cara modern.

4) Kekurangan Struktural

Kekurangan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya, yang umumnya dipengaruhi oleh aturan sosial, adat, atau sistem sosial-politik yang kurang mendukung upaya pengentasan kemiskinan (Elly M. Setiadi, 2013, hlm. 796).

c. Teori Kemiskinan

1) Filosofi Adam Smith

Menyatakan bahwa tidak akan ada masyarakat yang sejahtera dan bahagia apabila sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dalam karyanya *The Wealth of Nations*, Adam Smith menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi juga sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta adanya perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman atau kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Kiha et al., 2021).

a) Filosofi Pradigma Neo- Liberal

Filosofi Pradigma Neo- Liberal merupakan kemiskinan ialah kasus orang bukan kasus golongan yang dipengaruhi oleh kelemahan ataupun opsi hidup orang yang berhubungan. Kemiskinan hendak lenyap bila kekuatan- kekuatan pasar diperluas sebesar- besarnya serta perkembangan ekonomi ditingkatkan maksimal. Dalam penyelesaian kemiskinan wajib tidak bertabiat sedangkan serta tidak cuma mengaitkan keluarga, kelompok- kelompok swadaya warga ataupun Badan keimanan.

b) Filosofi Paradigma Sosial Demokrat

Filosofi Paradigma Sosial Demokrat memandang kemiskinan bukan sebagai persoalan individu, melainkan sebagai masalah yang bersifat sistemik. Kemiskinan muncul akibat adanya ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan di masyarakat, yang disebabkan oleh terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber daya sosial. Para pendukung Sosial Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan syarat penting untuk mencapai kebebasan yang sesungguhnya.

2) Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty)

Menurut Nurkse, kemiskinan bersifat siklikal dan saling berkaitan. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan akhirnya kembali pada produktivitas yang rendah. Lingkaran ini berputar terus tanpa ujung apabila tidak ada intervensi struktural. Dalam teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan di masa lalu, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan di masa depan. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama penyebabnya, yaitu: (i) keterbelakangan dan keteringgalan yang tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan, (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) keterbatasan modal yang mengakibatkan rendahnya produktivitas.

Produktivitas yang rendah pada akhirnya menurunkan pendapatan yang dapat diperoleh.

Rendahnya pemasukan hendak berimplikasi pada rendahnya dana serta pemodalannya. Rendahnya pemodalannya berdampak pada rendahnya penumpukan modal alhasil cara investasi lapangan kegiatan kecil (terlihat oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya penumpukan modal dipengaruhi oleh keterbelakangan, serta sedemikian itu seterusnya.

3) Menurut teori Todaro

Kemiskinan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berfungsi sebagai alat untuk membandingkan kesejahteraan antarnegara maupun antardaerah. (Putra, 2019)

4) Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) Gary Becker

Teori ini menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas individu, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Namun dalam konteks Sumatera Barat, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, pengangguran terdidik tetap tinggi, menunjukkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja. (Fitriyanto, 2024)

d. Dimensi Kemiskinan

Dimensi kemiskinan bagi Nurkse (dalam Yunizar Alfiando 2019) dengan cara simpel serta biasa dipakai bisa dibedakan jadi 3, ialah:

- 1) Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya. Penilaiannya didasarkan pada tingkat kebutuhan yang umumnya dibatasi pada kebutuhan utama atau minimum yang memungkinkan seseorang hidup layak. Apabila

pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum tersebut, maka individu tersebut digolongkan sebagai miskin.

Tingkatan pemasukan minimal ialah batas antara kondisi miskin serta tidak miskin ataupun kerap diucap garis batasan kemiskinan. Rancangan ini kerap diucap dengan kemiskinan mutlak. Rancangan ini dimaksudkan buat memastikan tingkatan pemasukan minimal yang lumayan buat penuh keinginan raga kepada santapan, Pakaian dan tempat tinggal menjadi bagian penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kemiskinan Relatif — Seseorang digolongkan dalam kemiskinan relatif apabila mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi tingkat kehidupannya masih jauh di bawah rata-rata masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan dapat mengalami perubahan seiring dengan pergeseran tingkat kehidupan masyarakat, sehingga sifatnya dinamis dan akan selalu ada. Dengan demikian, kemiskinan juga dapat dilihat dari sudut pandang kesenjangan sosial, yaitu semakin lebar jurang pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah, maka semakin banyak pula penduduk yang masuk dalam kategori miskin.

Kemiskinan kultural terjadi ketika individu atau sekelompok masyarakat enggan berusaha memperbaiki taraf hidupnya, meskipun telah mendapat bantuan atau dukungan dari pihak lain. Dengan kata lain, kemiskinan ini muncul akibat perilaku dan sikap dari orang tersebut sendiri, seperti malas atau tidak memiliki kemauan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

2) Masyarakat Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun nonpangan, yang pengukurannya didasarkan pada besaran pengeluaran. Dengan demikian, penduduk miskin adalah mereka

yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

3) Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan (GK) ialah enumerasi dari Garis Kemiskinan Santapan (GKM) serta Garis Kemiskinan Non Santapan (GKNM). Masyarakat yang mempunyai pada umumnya pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan selaku masyarakat miskin.

Garis Kemiskinan Pangan (GKM) merupakan jumlah pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan ini dihitung berdasarkan paket komoditas seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayur-mayur, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain sebagainya.

Garis Kemiskinan Non Pangan (GKNM) adalah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar ini diwakili oleh 51 jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas di wilayah pedesaan.

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019)

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

a) Persentase Masyarakat Miskin

Head Count Index (HCI- PO) merupakan persentase masyarakat yang terletak dibawah garis kemiskinan (GK).

b) Indikator Daya Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) mengukur rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar

rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

c) Indikator Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) menggambarkan tingkat pemerataan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran di kalangan masyarakat miskin.

e. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemiskinan

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut (Suryana,2000)

1) Pendidikan

Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di suatu negara. Hal ini dipicu oleh minimnya tingkat pendidikan serta pengetahuan para tenaga kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor industri, dibutuhkan lebih banyak pekerja yang memiliki keterampilan atau setidaknya mampu membaca dan menulis.

2) Lapangan Pekerjaan

Lapangan kerja merupakan suatu tempat atau instansi yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Di negara berkembang, usia angkatan kerja biasanya dimulai dari 15 tahun ke atas, meskipun pada usia tersebut seseorang masih tergolong anak-anak. Secara ideal, usia yang layak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan adalah di atas 17 tahun. Di Indonesia, kualitas angkatan kerja masih tergolong rendah karena sebagian besar tenaga kerja tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SD maupun SMP.

3) Pendapatan

Secara umum, indikator yang paling sering digunakan untuk menilai laju pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pertumbuhan pendapatan

nasional serta pendapatan per kapita. Jumlah pendapatan nasional akan memengaruhi besaran pendapatan per kapita, sedangkan pendapatan per kapita kerap dijadikan acuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4) Pengeluaran

Menurut Suryana, dalam kajian makroekonomi, perhitungan pendapatan nasional didasarkan pada jenis pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, pemerintah, serta sektor luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor. Alasan pertama, konsumsi rumah kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasannya yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Struktur pengeluaran masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Semakin sedikit porsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dicapai. Pola pengeluaran untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pendapatan masyarakat.

5) Pengangguran

pengangguran juga merupakan variabel penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Tingginya angka pengangguran, khususnya pengangguran terdidik, akan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan rumah tangga, sehingga memperbesar kemungkinan mereka masuk dalam kategori miskin. Menurut Todaro dan Smith (2020), pengangguran yang tinggi menyebabkan hilangnya potensi produktivitas masyarakat, melemahkan daya beli, serta meningkatkan kerentanan sosial. Dalam konteks Sumatera Barat, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tingginya

pengangguran terdidik menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja terampil dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini dapat memicu persoalan kemiskinan struktural di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, seperti penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran komposit yang mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu pendidikan (knowledge), kesehatan (longevity), dan standar hidup layak (decent living). Tingginya nilai IPM menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang baik, yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan manusia memiliki keterkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan, karena peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan akan mendorong produktivitas serta memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi IPM, seharusnya semakin rendah tingkat kemiskinan.

f. Dampak Kemiskinan

Berdasarkan berbagai faktor penyebab yang telah dijelaskan, muncul satu permasalahan sosial utama, yaitu kemiskinan. Satu masalah sosial ini saja dapat memicu timbulnya beragam persoalan sosial lainnya. Kemiskinan berdampak luas pada aspek sosial, mulai dari meningkatnya tindakan kriminal, pengangguran, terganggunya pelayanan kesehatan, dan berbagai masalah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai pihak, maraknya tindak kejahatan umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

g. Solusi Terhadap Kemiskinan

Sebagian pemecahan yang bisa dicoba buat menanggulangi permasalahan kemiskinan:

1) Meluaskan Lapangan Kerja

Metode ini yang lumayan jitu dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terdapat dengan metode kurangi jumlah tingkatan pengangguran yang bertambah meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja di setiap wilayah, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu menyesuaikan ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang ada.

2) Membagikan Dorongan Pembelajaran Dengan Cara Gratis

Pemerintah telah menjalankan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan keringanan biaya sekolah bagi siswa yang orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan langkah tersebut, masalah putus sekolah dapat diminimalkan sehingga kelak lulusan memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk memasuki dunia kerja.

3) Membagikan Sarana yang mencukupi serta Bantuan Gratis

Pemerintah sebaiknya berperan dalam menyediakan fasilitas yang memadai di setiap wilayah. Penyediaan tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi berbagai sarana dan infrastruktur yang dinilai masih kurang atau belum mencukupi. Setelah fasilitas tersebut terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan layak dan nyaman.

4) Membuka Lapangan Kegiatan Sendiri

Untuk mencegah kemiskinan, seseorang dapat mengambil inisiatif dengan memulai usaha sendiri. Saat memulai usaha, dibutuhkan berbagai sumber daya dan keterampilan sebagai modal

untuk menjalankannya. Melalui cara ini, angka pengangguran yang merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan dapat ditekan.

Saat ini, pemerintah memiliki berbagai program terpadu untuk mengatasi kemiskinan. Beberapa di antaranya meliputi program pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, serta program pengembangan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Suku bangsa, 2013)

h. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Istilah kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang diberi awalan "ke-" dan akhiran "-an," yang dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yang mirip dengan "kefakiran," yang berasal dari kata dasar "fakir" dengan awalan dan akhiran yang sama. Kedua istilah ini sering digunakan bersamaan dalam frasa "fakir miskin," yang merujuk pada orang yang sangat kekurangan. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa istilah yang menggambarkan kemiskinan, seperti faqir, miskin, al-sail, dan al-mahrum, dengan dua kata pertama—faqir dan miskin—paling sering muncul. Kata "faqir" ditemukan sebanyak 12 kali, sementara kata "miskin" disebutkan 25 kali dalam Al-Quran (Aprianto, 2017)

Dalam bahasa Arab, kata "miskin" berasal dari istilah "saksana" yang memiliki arti diam atau tenang, sementara kata "fakir" berasal dari kata "faqr" yang awalnya bermakna tulang punggung. Istilah "faqir" menggambarkan seseorang yang tulang punggungnya patah, yang berarti beban yang dipikul sangat berat hingga menyebabkan tulang punggung tersebut patah (Nafilah, 2016).

Terdapat dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda; sebagian berpendapat bahwa kedua kategori tersebut pada dasarnya sama, seperti yang disampaikan oleh Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim, pengikut Imam Malik. Namun, mayoritas ulama beranggapan bahwa keduanya merupakan dua kelompok yang berbeda namun sejenis, terutama dalam

hal kondisi kekurangan dan kebutuhan. Ahli tafsir dan fikih juga memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan kedua istilah tersebut. Yusuf Al-Qardhawi mengibaratkan bahwa kedua kata ini memiliki hubungan serupa dengan Islam dan Iman, yang walaupun sering disebut bersama, memiliki makna yang berbeda, masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar (Qardhawi, 2002)

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena adanya alasan khusus yang diakui secara syar'i (uzur syar'i), seperti usia lanjut atau kesibukan dalam kegiatan dakwah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, miskin diartikan sebagai individu yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya meskipun memiliki pekerjaan dan penghasilan (Beik, 2016). Sedangkan menurut Al-Ghazali, kemiskinan adalah

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Ketidakmampuan dalam memenuhi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok tidak termasuk dalam definisi kemiskinan (Huda, 2015)

i. Penyebab Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Adapun penyebab kemiskinan yaitu terjadinya perbedaan pendapat. Keberadaan masyarakat yang memiliki penghasilan yang berbeda-beda sesungguhnya tidak dapat dinafikan. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak pernah berbicara tentang upaya untuk “menghilangkan” Pembahasan mengenai kemiskinan tidak hanya sebatas pada pengertiannya, tetapi lebih pada upaya mengurangi dan meminimalkan dampaknya agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Hal ini dapat diwujudkan melalui sikap saling tolong-menolong, membantu satu sama lain, menjaga tali silaturahmi, serta saling berkontribusi dan bekerja sama secara sinergis (Beik dan Arsyianti, 2016).

Menurut Retno (2013), kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural, yaitu:

- 1) Kemiskinan muncul sebagai akibat dari perilaku manusia yang merusak lingkungan karena ketidakmampuan dalam mengelolanya secara bijak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mulk yang menyatakan bahwa:

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرِزُّكُمْ إِنَّا أَمْسَكْ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ



Artinya: “Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?”

- 2) Kemiskinan yang timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok yang kaya terhadap kelompok yang lain (miskin) sebagaimana diterangkan dalam QS. Ali „Imran sebagai berikut:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

j. Bahaya Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Apabila kemiskinan terus berkembang pesat, hal ini dapat menyebabkan seseorang lupa akan keberadaan Allah serta melemahkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Rasulullah SAW menjelaskan betapa besar bahaya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwa kefakiran hampir menyerupai kekufuran (Aprianto, 2017b). Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kekafiran mendekati kekufuran.” (HR. Abu Dawud)

Kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan paling parah seringkali dipandang sebagai masalah sosial yang sangat serius. Di lingkungan masyarakat miskin, paham-paham ekstrem mudah menarik perhatian, dan berbagai tindakan tercela kerap dianggap wajar demi memenuhi kebutuhan. Fenomena ini pernah terjadi pada masa jahiliah, di mana orang-orang tega membunuh anak-anak mereka karena takut akan hinaan akibat kemiskinan, serta menyadari dampak

negatif kemiskinan yang dapat mengancam kehidupan (Cahaya, 2015). Kemiskinan dipandang sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan karena:

- 1) Kemiskinan membahayakan akidah
- 2) Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral
- 3) Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran
- 4) Kemiskinan membahayakan keluarga
- 5) Kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya

k. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Terdapat 4 (empat) instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam (Lestari, 2017) yaitu:

1) Zakat

Zakat memiliki aturan yang sangat jelas dan adil, dengan mewajibkan membayarkan 2,5 persen dari hartanya setiap tahun zakat mampu mendorong masyarakat untuk memberdayakan hartanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan ekonomi. Selain itu zakat Zakat memiliki dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek ekonomi, seperti meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat pengangguran, dan mengurangi kesenjangan pendapatan, dengan syarat bahwa zakat yang diberikan tidak hanya digunakan untuk konsumsi semata. Zakat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Melalui pengelolaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat dapat membantu mengubah penerima manfaat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki) di masa mendatang.

2) Infak

Infak atau sedekah adalah pemberian sukarela dari seorang muslim tanpa batasan waktu maupun jumlah tertentu, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh ridha Allah SWT. Infak dan sedekah bisa berupa materi, seperti uang dan barang, maupun non-materi, seperti keahlian yang diberikan sesuai profesi—misalnya

seorang guru yang menyumbangkan ilmunya kepada lembaga pendidikan. Bentuk infak atau sedekah ini dianggap memberikan manfaat yang lebih besar secara langsung karena dapat meningkatkan kualitas manusia melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya.

3) Wakaf

Wakaf adalah bentuk sumbangan berupa barang atau kepemilikan yang diberikan untuk digunakan demi kepentingan umum. Upaya mengatasi kemiskinan melalui wakaf mencakup pengembangan lembaga, peningkatan akses, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi politik. Penggunaan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat tercermin dari pemanfaatannya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Secara ekonomi, harta wakaf dapat juga untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, seperti dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.

4) Waris

Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Dalam Islam, konsep waris berfungsi sebagai mekanisme pembagian kekayaan serta sebagai bentuk jaminan sosial nyata dalam keluarga. Pembagian harta secara adil melalui warisan ini mendorong pewaris agar tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin.

2. Pengangguran Terdidik

a. Pengertian Pengangguran

Berdasarkan International Labour Organization (ILO), pengangguran diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak

memiliki pekerjaan namun sedang secara aktif mencari kesempatan untuk kembali bergabung ke dalam pasar tenaga kerja. (Conway, 2015).

Pengangguran adalah situasi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja berkeinginan memperoleh pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran merupakan persoalan makroekonomi yang berdampak langsung pada individu dan sering dianggap sebagai masalah yang paling serius. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar hidup serta munculnya tekanan mental. (Lestari, 2015)

Menurut standar internasional, pengangguran didefinisikan sebagai individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang aktif mencari pekerjaan dengan upah tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Berdasarkan definisi ini, kelompok seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, serta anak dewasa dari keluarga kaya yang tidak bekerja tidak dikategorikan sebagai penganggur karena mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan. (Sukirno, 2012)

Secara umum, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan tengah aktif mencari pekerjaan. Namun, seseorang yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan tidak selalu dikategorikan sebagai penganggur. Selain itu, pengangguran juga dapat diartikan sebagai situasi di mana sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal.

b. Pengangguran Terdidik

Kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang umumnya tergolong rendah dan kurang memiliki mobilitas. Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas tenaga kerja per jam baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun penelitian ilmiah. Banyak tenaga kerja yang minim mobilitas serta tidak memiliki keterampilan, kemampuan, dan motivasi kerja yang tinggi, yang biasanya disebabkan

oleh rendahnya tingkat pendidikan. Bahkan bagi mereka yang berpendidikan, kebanyakan hanya siap bekerja pada pekerjaan yang kurang inovatif, lebih banyak berperan sebagai pekerja daripada sebagai pengusaha. Oleh karena itu, model pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan berinisiatif sebagai pengusaha perlu dikembangkan lebih luas. Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sekolah di negara berkembang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perencanaan pendidikan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak institusi pendidikan hanya mencetak lulusan yang kurang memiliki daya saing di pasar kerja. Dari tahun ke tahun, jumlah lulusan dari berbagai jenjang pendidikan yang menganggur terus meningkat, termasuk para sarjana. Sebagian besar institusi pendidikan di negara berkembang lebih banyak menghasilkan pekerja daripada pengusaha.

Menurut Badan Pusat Statistik (2012) pengangguran terdidik adalah rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke atas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada Kelompok ini juga dikenal sebagai pengangguran terdidik, yaitu para lulusan SMA/K, Diploma, dan Sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Menurut Putri (2015), pengangguran terdidik terjadi karena ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan sektor pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Selain penguasaan ilmu pengetahuan, para lulusan yang siap memasuki dunia kerja juga memerlukan keterampilan tambahan di luar bidang akademik. Pengangguran terdidik biasanya memiliki standar tinggi dalam memilih pekerjaan, seperti menginginkan fasilitas lengkap, posisi yang baik, serta gaji yang memadai. (Putri, 2015)

Sumarsono, sebagaimana dikutip dalam Putri (2015), menjelaskan bahwa pengangguran terdidik adalah angkatan kerja yang memiliki pendidikan minimal tingkat menengah ke atas seperti SMA/K, Diploma, dan Sarjana, namun belum memperoleh pekerjaan. Penyebab

utama pengangguran terdidik meliputi krisis ekonomi, ketidakseimbangan struktur lapangan kerja, kebutuhan yang tidak sesuai antara jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik, ketidakseimbangan pasokan tenaga kerja terdidik, serta jumlah angkatan kerja yang melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan.

Sadono Sukirno mengungkapkan beberapa penyebab yang menjelaskan mengapa kualitas pendidikan di negara-negara berkembang cenderung rendah, yaitu:

- 1) Mutu pendidikan yang rendah disebabkan karena kekurangan biaya yang dapat disediakan untuk pendidikan.
- 2) Kurangnya buku teks yang sesuai dengan kepentingan dan keadaan negara-negara yang bersangkutan. Buku teks yang digunakan adalah buku teks yang didatangkan dari negara-negara barat yang mempunyai dasar analisis serta struktur yang belum tentu dapat dipergunakan di negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga mereka mempelajari buku-buku barat yang sukar dipraktikan dalam keidupan sehari-hari.
- 3) Minimnya fasilitas pendukung dan gaji yang terbilang rendah mengurangi motivasi para pengajar dalam memberikan pengajaran secara optimal kepada siswa dan mahasiswa. Kondisi fasilitas seperti perpustakaan dengan koleksi buku teks yang memadai, laboratorium, serta peralatan teknis untuk eksperimen juga sangat terbatas.

Menurut Mankiw (2003), pengangguran terdidik adalah individu yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja dengan latar belakang pendidikan minimal SMA. Kondisi ini terjadi ketika tenaga kerja terdidik menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan bukan karena kurangnya peluang kerja, melainkan karena mereka lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Prihanto (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran terbuka dan berpendidikan dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat serta menurunnya produktivitas. Selain itu, peningkatan pengangguran

juga berpotensi menimbulkan dampak serius pada aspek sosial dan politik, seperti meningkatnya tingkat kriminalitas dan ketidakstabilan politik.

Menurut Fitri (2015), dalam penelitiannya ditemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan, semakin besar peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan, sehingga angka pengangguran terdidik cenderung menurun. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dianggap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Oleh karena itu, kesempatan untuk melamar pekerjaan di berbagai sektor usaha semakin luas, karena perusahaan biasanya mencari tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas tenaga kerja ini umumnya dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Sementara itu kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini bukan hanya karena tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga karena pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat.

c. Indikator Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik umumnya berasal dari lapisan masyarakat menengah ke atas yang memiliki jaminan hidup meskipun tidak bekerja. Masalah pengangguran terdidik ini erat kaitannya dengan isu pendidikan di negara-negara berkembang, yang meliputi kualitas pendidikan, kesiapan tenaga pengajar, ketersediaan fasilitas, serta persepsi masyarakat terhadap pendidikan.

Indikator pengangguran terdidik meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dengan total penduduk yang berada dalam usia kerja pada kelompok yang sama. TPAK ini dapat dihitung untuk seluruh penduduk usia kerja maupun untuk kelompok tertentu seperti laki-laki, perempuan, tenaga kerja terdidik, dan lain sebagainya. (Meri Rahmania, 2019)

d. Hubungan Pengangguran Terdidik Terhadap Kemiskinan

Menurut *Teori Modal Manusia* yang dikembangkan oleh Gary Becker, pendidikan merupakan bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun dalam konteks pengangguran terdidik, terjadi paradoks di mana individu dengan pendidikan tinggi justru sulit mendapatkan pekerjaan karena ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menciptakan di mana individu tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, sehingga tetap menganggur dan berisiko jatuh dalam kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran terdidik mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi belum otomatis menjamin seseorang terbebas dari kemiskinan. Tanpa penyesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, serta penciptaan lapangan kerja baru yang relevan, maka pengangguran terdidik tetap tinggi dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. (Puspasari, 2019)

e. Pengangguran Terdidik dalam Perspektif Islam

Tenaga kerja merupakan segala bentuk usaha dan aktivitas yang dilakukan baik secara fisik maupun mental oleh individu untuk memperoleh imbalan yang layak. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja memiliki peran penting karena sumber daya alam tidak akan berguna tanpa adanya pengelolaan dan pengolahan oleh manusia. Meskipun alam menyediakan kekayaan yang melimpah, tanpa upaya manusia semua itu akan tetap tidak termanfaatkan (Afzalur Rahman, 1995). Dalam Al-Qur'an, pekerjaan mendapat perhatian khusus, dengan penjelasan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja keras mencari nafkah. Manusia diwajibkan untuk selalu berusaha dan dilarang bermalas-malasan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Insyirah ayat 7 yang menyatakan:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦﴾

Artinya: *“Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk terus bekerja, dan setelah menyelesaikan satu tugas, hendaknya melanjutkan dengan pekerjaan lainnya. Pekerjaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada ibadah untuk akhirat, tetapi juga mencakup aktivitas duniawi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ayat ini menegaskan larangan bagi seseorang untuk bermalas-malasan atau menganggur. Dengan bekerja, kehidupan akan menjadi lebih sejahtera, kebutuhan terpenuhi, dan seseorang bahkan mampu membantu mereka yang kurang beruntung seperti fakir dan miskin.

Masalah pengangguran berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum optimal pemanfaatannya, baik karena keterbatasan lapangan pekerjaan maupun rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan berbagai upaya, salah satunya melalui pengembangan sumber daya manusia dengan menyediakan pendidikan formal yang terstruktur mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan lanjutan.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat muslim saat ini menunjukkan tingginya jumlah pengangguran, terutama di usia produktif dan pada kelompok yang berpendidikan. Islam mengemukakan keras sikap malas yang menyebabkan seseorang enggan bekerja, alasan gaji yang rendah, atau pekerjaan yang dianggap kurang layak. Dalam ajaran Islam, pengangguran dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu:

f. Faktor Individu, terdiri dari:

1) Faktor Kemalasan

Pengangguran yang disebabkan oleh kemalasan individu sebenarnya hanya sebagian kecil saja, contohnya adalah beberapa

orang miskin yang enggan bekerja karena berharap cepat kaya melalui cara seperti berjudi atau mengikuti undian.

2) Faktor cacat / uzur

Dalam sistem kapitalis, hukum yang berlaku cenderung seperti hukum rimba, sehingga tidak ada ruang bagi individu yang memiliki keterbatasan atau cacat untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

3) Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan

Saat ini sekitar 75% tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD dan SMP. Dampak dari rendahnya pendidikan ini adalah rendahnya keterampilan yang mereka miliki.

g. Faktor sistem sosial dan ekonomi, di antaranya:

- 1) Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan.
 - 2) Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
 - 3) Pengembangan sektor ekonomi non-ril.
 - 4) Banyaknya tenaga kerja yang disebabkan pertumbuhan penduduk.
- (Defi Sapitri, n.d.)

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran numerik yang menilai pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen utama kualitas hidup yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas individu (Abu Bakar, 2021)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembangunan manusia, mencakup aspek fisik seperti kesehatan dan kesejahteraan, serta aspek non-fisik seperti tingkat intelektualitas. Dampak pembangunan terhadap kondisi fisik masyarakat tercermin melalui angka harapan hidup dan daya beli, sementara aspek non-fisik diukur melalui kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting yang sering dipakai untuk menilai upaya dan hasil keseluruhan dari program pembangunan di suatu daerah. IPM dianggap sebagai representasi dari capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, kemajuan pembangunan selama suatu periode dapat diukur dengan membandingkan nilai IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegualitas dan standar hidup layak.

b. Teori Indeks Pembangunan (IPM)

Menurut teori modal manusia yang dikemukakan oleh Sumarsono (2009), seseorang dapat meningkatkan pendapatannya dengan menambah pendidikan. Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa peningkatan pendidikan akan berpengaruh pada kenaikan penghasilan dan menurunkan risiko pengangguran. Namun, yang menarik adalah kenyataan bahwa kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi justru memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, sedangkan masyarakat dengan pendidikan rendah justru cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Upaya meningkatkan ketersediaan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat, memperbaiki taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses aktivitas ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang terkandung dalam indeks pembangunan manusia meliputi hal-hal berikut: (Siska Yanti Maratade, 2016)

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)
- 2) Angka Melek Huruf Rata – Rata (AMHR)

c. Komponen – Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Statistik Indonesia, angka harapan hidup saat lahir (life expectancy at birth) menggambarkan rata-rata lama hidup yang diperkirakan akan dijalani oleh bayi yang lahir pada tahun tertentu.(Budiantara, 2013)

Menurut BPS, angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia rata-rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir.(*Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, 2015)

Program Mortpak digunakan dalam perhitungan angka harapan hidup dengan memanfaatkan dua jenis data, yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Data ini diharapkan dapat mencerminkan rata-rata usia hidup serta kondisi kesehatan masyarakat. Untuk memperoleh Indeks Harapan Hidup, angka harapan hidup tersebut distandarkan berdasarkan nilai maksimum dan minimum yang telah ditetapkan.

2) Tingkat Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Diketahui bahwa pengembangan sumber daya manusia di suatu negara sangat berperan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia merupakan pelaku utama yang mengumpulkan modal, memanfaatkan berbagai sumber daya, serta menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik yang krusial bagi kemajuan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal

yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara.(Hera Susanti, 2002)

Perhitungan Indeks Pendidikan melibatkan dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah merujuk pada perkiraan jumlah tahun sekolah yang akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Angka ini dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai program wajib belajar. (*Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, 2015)

Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Pada proses perhitungannya masing-masing diberi bobot sepertiga.

3) Standar Hidup Layak

Standar hidup layak secara luas mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari perbaikan kondisi ekonomi. Indeks ini menggambarkan sejauh mana kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat menjalani kehidupan dengan layak.

Dalam mengukur standar hidup layak atau daya beli, UNDP memakai GNP riil yang sudah disesuaikan. Karena data PNB per kapita tidak tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka digunakan proksi berupa pengeluaran per kapita yang disesuaikan berdasarkan data SUSENAS. Rata-rata pengeluaran per kapita tahunan diperoleh dari Susenas dan dihitung mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Pengukuran standar hidup layak dilakukan dengan menghitung rata-rata pengeluaran per kapita riil yang sudah disesuaikan menggunakan paritas daya beli (Purchasing Power

Parity/PPP) berdasarkan Metode Rao. Dalam proses perhitungannya, digunakan batasan nilai minimum dan maksimum.

d. Kebijakan dalam Peningkatan kualitas Hidup Manusia

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara sektoral, adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas fisik manusia (*Individual fisycal quality*) meliputi jasmani, rohani, dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gii, sandang, perumahan, dan pemukiman yang sehat.
- 2) Peningkatan kualitas keterampilan (*Skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- 4) Peningkatan pranata dan penerapan hokum yang meliputi kelembagaan, perangkat dan aparat, serta kepstian hokum. Sedangkan secara sektoral, opsionalnya dilaksanakan melalui berbagai sector pembangunan, antara lain sector pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial,kependudukan, tenaga kerja, dan sektor – sektor pembangunan lainnya. (Mulyadi, 2014)

Teori pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu: pertama, umur panjang dan sehat yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir; kedua, dimensi pendidikan yang diukur dari tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah, yang dirangkum dalam Indeks Pendidikan; dan ketiga, dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan melalui pengeluaran riil per kapita (Hasan, 2016).

e. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Adapaun Faktor – Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia menurut kuncoro antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar masyarakat miskin mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga kebutuhan lain tidak dapat terpenuhi secara memadai. Berdasarkan kondisi ini, dibutuhkan solusi serta intervensi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan cara meningkatkan produktivitas yang rendah dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. PDRB sering kali dikaitkan dengan upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kemajuan dalam pembangunan manusia. (Supit, 2023)

f. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan

Teori Pembangunan oleh Todaro menyebutkan bahwa pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketiga indikator ini tercermin dalam IPM yang berfungsi sebagai ukuran kesejahteraan manusia. Semakin tinggi IPM suatu daerah, maka menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki kualitas hidup yang baik, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta pendapatan yang cukup. Dengan demikian, IPM memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi nilai IPM, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut cenderung menurun. (Todaro, M., & Smith, 2011)

g. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Yasmin (2018) menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas yang baik akan meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi, serta produktivitas masyarakat. Peningkatan tersebut pada akhirnya meningkatkan daya saing dan peluang kerja,

baik dalam dunia usaha maupun dalam membuka usaha sendiri, sehingga pengangguran menurun dan pendapatan meningkat. Dengan berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan akan tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan.

Dalam suatu lingkaran kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu:

- 1) Rendahnya tingkat Kesehatan.
- 2) Rendahnya pendapatan;
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah harus berusaha mengurangi ketiga faktor penyebabnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

h. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Islam memandang manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan. Agama Islam memberikan pedoman hidup yang komprehensif bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan berdasarkan ras, bangsa, maupun warna kulit. Dari sudut pandang pengakuan manusia terhadap keesaan Tuhan serta ketaatan pada kehendak dan petunjuk-Nya, manusia memiliki misi sebagai hamba bagi Sang Pencipta. Ibadah dan pengabdian kepada-Nya menjadi tujuan utama hidup manusia. Karena Islam bersifat menyeluruh (kaffah), maka ibadah pun mencakup semua aspek kehidupan. Dalam perspektif Islam, tujuan pembangunan adalah meraih keberhasilan di akhirat. Apabila konsep seseorang tidak tepat, maka segala hasil yang dibangun berdasarkan konsep tersebut juga tidak akan sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa jika manusia sebagai pelaku pembangunan tidak

menginternalisasi dan menerapkan nilai moral serta etika universal, kesuksesan tidak dapat dijamin.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-ruum ayat 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*(Q.S Ar-ruum: 30)

Penjelasan ayat tersebut mengandung makna bahwa tujuan penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sepanjang hidup di dunia, manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dan tunduk hanya kepada Allah. Sebagai khalifah di bumi, kita bertanggung jawab menjaga kepercayaan dari Allah dengan terus mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia menitikberatkan pada peran aktif individu dalam proses pembangunan itu sendiri. Salah satu peran penting manusia adalah menuntut ilmu secara maksimal melalui pendidikan. Dengan begitu, kualitas hidup seseorang akan meningkat seiring bertambahnya keterampilan dan pengetahuan, yang pada akhirnya dapat menghindarkan mereka dari kemiskinan.

Menurut Omar M. Al Tauny dalam bukunya Falsafah At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah (Filosofi Pendidikan Islam), tujuan pendidikan dalam Islam dijelaskan sebagai berikut (Beik dan Arsyanti, 2016):

- 1) Tujuannya adalah untuk mendukung pembentukan karakter yang terpuji. Oleh karena itu, akhlak mulia menjadi inti dari setiap proses pendidikan dalam Islam.
- 2) Untuk membekali peserta didik agar siap menjalani kehidupan di dunia dan akhirat secara seimbang.
- 3) Membekali peserta didik agar mampu menjaga semangat ilmiah (scientific spirit) serta menumbuhkan rasa ingin tahu (curiosity) dalam proses pencarian dan penemuan ilmu.
- 4) Mempersiapkan anak didik dalam menguasai keahlian tertentu sesuai dengan keterampilan dan kemampuan.
- 5) Mempersiapkan anak didik agar memiliki rasa tanggung jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk social.
- 6) Mengajak anak didik agar dapat memahami hikmah dengan diciptakannya alam semesta dan memanfaatkannya dengan sebaik dan seoptimal mungkin.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Febriyanka Lidya dan rekan-rekannya melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal berjudul “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran Terdidik terhadap Kemiskinan di Kota Lhokseumawe.” Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel dependen yaitu kemiskinan, serta variabel independen berupa pengangguran terdidik dan indeks pembangunan manusia. Perbedaannya adalah lokasi penelitian; Febriyanka Lidya melakukan penelitian di Kota Lhokseumawe pada periode 2010–2022, sedangkan saya meneliti di Provinsi Sumatra Barat selama tahun 1993–2023. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial, inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, IPM memiliki

pengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, pengangguran terdidik menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan pengangguran terdidik belum tentu berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan. Namun, secara bersama-sama ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe. (Lidya et al., 2024)

Guspita Sari, 2019 yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Utara”. Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Guspita Sari adalah persamaan variabel dependen yaitu kemiskinan dan persamaan independen yaitu indeks pembangunan manusia. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian yaitu beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara sedangkan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai probabilitas sebesar 0,8953 yang lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh positif tetapi juga tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai probabilitas 0,1600 yang melebihi 0,05. Namun, secara simultan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan variabel dummy secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai $F_{statistik} 167,2112 > F_{tabel} 2,29$.

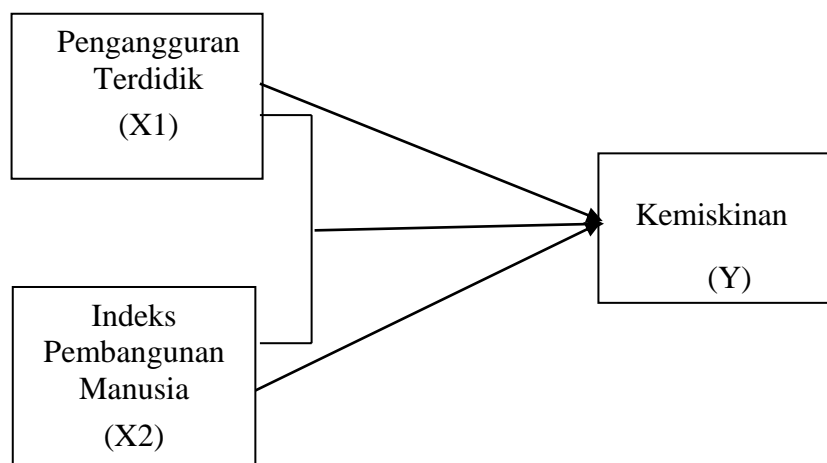
Ari Kristin Prasetyoningrum 2018 yang berjudul Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

R Fadila dkk 2020 (Jurnal Pendidikan Ekonomi) yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Priode Tahun 2013- 2018. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Dona menguji IPM dan PDRB terhadap kemiskinan di Sumatera Barat periode 2017–2021, dan hasilnya IPM berpengaruh signifikan. Hal ini serupa dengan penelitian yang juga menemukan pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Bedanya, Dona menekankan faktor ekonomi makro (PDRB), sedangkan penelitian ini menekankan faktor tenaga kerja (pengangguran terdidik). Perbedaan ini menunjukkan bahwa selain pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja juga penting dianalisis bersama IPM.

Penelitian Zaki, Yolanda, Hendry Ali, & Pudji Astuti (2023) Penelitian ini menguji pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan IPM terhadap kemiskinan di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2011–2019. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan dan IPM berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ketimpangan meningkatkan kemiskinan. Penelitian ini memperkuat hasil skripsi saya bahwa IPM memang berkontribusi menurunkan kemiskinan. Namun, penelitian saya berbeda karena menambahkan pengangguran terdidik sebagai variabel penting, yang justru merupakan dampak dari pendidikan yang tidak terserap di pasar kerja. Dengan demikian, penelitian saya melengkapi studi Zaki dkk. dengan menekankan bahwa pendidikan berkualitas harus sejalan dengan kesempatan kerja agar pengurangan kemiskinan lebih efektif.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

Keterangan :

X = Variabel bebas (Independen)

Y = Variabel terikat (Dependen)

—————> : Berpengaruh secara persial

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal yang akan diuji validitasnya melalui penelitian. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa hipotesis memiliki beberapa unsur penting, yaitu sifatnya yang sementara, adanya hubungan antara variabel, serta kemampuan untuk diuji kebenarannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, studi sebelumnya, dan kerangka pemikiran yang ada, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{01} : Pengangguran Terdidik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

H_{a1} : Pengangguran Terdidik berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

H_{02} : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

Ha₂: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat

H0₃: Pengangguran Terdidik dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

Ha₃: Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Nawawi (2005:63), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta melukiskan kondisi objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, fokusnya adalah memberikan gambaran yang lengkap dan deskriptif mengenai latar belakang struktur dan individu, serta menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang ada.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatra Barat dengan rentang waktu dari tahun 1994 hingga 2023, menggunakan data mengenai Pengangguran Terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2024	Desember s/d Juni 2025							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus
1	Survei awal									
2	Bimbingan proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Revisi Proposal									
5	Pengurusan Surat Izin Penelitian									
6	Penelitian									
7	Mengelola Data									
8	Bimbingan Penelitian									
9	Munaqasyah									

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Data yang diperoleh mencakup informasi tentang pengangguran terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kemiskinan: (www.sumbar.bps.go.id)

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data primer maupun sekunder dalam suatu penelitian. Tahap ini sangat penting karena data yang terkumpul akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode dokumentasi meliputi pencarian data terkait variabel melalui berbagai sumber seperti catatan, buku, prasasti, surat kabar, notulen rapat, dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari penelitian sebelumnya di Provinsi Sumatra Barat, seperti tingkat pengangguran terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta data dari Badan Pusat Statistik. (Sugiyono, 2007)

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk memproses, mengorganisir, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar dapat memperoleh informasi atau wawasan yang berguna. Teknik Analisa data sangat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari hasil regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa dalam model regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang ideal adalah yang menunjukkan residual dengan distribusi normal. Deteksi normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik melalui bantuan perangkat lunak SPSS 26 for Windows atau dengan memeriksa signifikansi pada tingkat 0,05.

Dalam penelitian ini digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), karena jumlah sampel yang digunakan termasuk dalam kategori sampel besa. Uji ini bekerja dengan cara membandingkan distribusi empiris residual dengan distribusi normal teoritis (Priyatno, 2014)

1.) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2.) Jika Sig > 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji multikolinieritas diukur menggunakan indikator VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas di antara variabel bebas tersebut. Sebaliknya, jika nilai VIF berada antara 0,10 hingga 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Proses pengujian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26 untuk Windows. (Kadir, 2015)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk penelitian ini yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah melalui grafik scatterplot yaitu grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik – titik pada bidang koordinat. (Imam, 2016)

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antara data pada periode t dengan periode sebelumnya. Pengujian ini biasanya dilakukan pada data deret waktu (time series) yang mencakup lebih dari satu tahun. Dalam model regresi, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji ini berguna untuk mendeteksi adanya korelasi antar nilai residual. Jika nilai DW mendekati angka 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi, sehingga model memenuhi asumsi klasik regresi (Slamet, 2017).

2. Koefisien determinasi

R-Square atau koefisien determinasi merupakan salah satu ukuran yang sederhana dan sering digunakan untuk menguji kualitas suatu persamaan regresi (Gujarati, 2004). Nilai R-Square menggambarkan sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Perhitungan nilai R-Square dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 26.

Buat mengenali tata cara ditaksir yang membagikan hasil yang lebih bagus, hingga patokan yang dipakai merupakan dengan menyamakan angka R- Square (R^2) yang membuktikan seberapa besar nisbah alterasi elastis terbatas yang dipaparkan oleh elastis bebas. Bagi Pemimpin (Ghozali 2011), angka (R^2) yang kecil berarti keahlian variabel- variabel bebas dalam Menjelaskan variasi variabel dependen secara terbatas. Nilai yang mendekati angka satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh data yang diperlukan

untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tergantung.

Masalah yang muncul saat melakukan pengujian menggunakan R-Square adalah ketika jumlah variabel bebas lebih dari satu, nilai R-Square cenderung meningkat. Oleh karena itu, pengujian menggunakan adjusted R-Square dilakukan untuk secara objektif menilai pengaruh keseluruhan variabel bebas dan menentukan apakah variabel-variabel tersebut benar-benar mampu memperkuat penjelasan variasi pada variabel dependen.

3. Analisis Linear Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun formula untuk teknik regresi linear berganda adalah sebagai berikut. (Priyatno, 2014)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 + X_2 + e$$

Keterangan

Y = Nilai prediksi variabel dependen (Kemiskinan)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi variabel independen (X_1 , X_2)

X_1 = Pengangguran Terdidik

X_2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

e = Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yaitu apakah variabel pengangguran terdidik dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*.

Langkah – langkah dalam uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan derajat kebebasan $(n - k - 1)$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti pengangguran terdidik dan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
- 2) Apabila nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dengan derajat kebebasan $(n-k-1)$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, secara parsial dapat dibuktikan bahwa variabel pengangguran terdidik dan IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
- 3) Jika nilai probabilitas ($sig\ t$) lebih besar dari α (0,05), maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas ($sig\ t$) lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji Simultan (uji Statistik f)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai koefisien regresi secara bersamaan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model secara kolektif (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel pengangguran terdidik dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat. Proses pengujian dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26 untuk Windows. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan uji F:

- 1) Apabila nilai f_{hitung} lebih kecil daripada f_{tabel} dengan derajat kebebasan $(k-1)$ dan $(n-k)$, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa seluruh variabel bebas

(pengangguran terdidik dan IPM) tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

- 2) Jika $f_{hitung} > f_{table}$ (k-1-n-k) maka menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a), artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas (pengangguran terdidik dan IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.
- 3) Jika nilai probabilitas (sig t) lebih besar dari α (0,05), maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas (sig t) lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak, menandakan adanya pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Sumatera Barat secara geografis berada di koordinat antara 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dan 0°54' hingga 3°30' Lintang Selatan. Wilayahnya mencakup daratan seluas sekitar 42.297,30 km² serta perairan laut seluas kurang lebih 186.580 km², dengan garis pantai daratan sekitar 375 km. Jika ditambahkan dengan panjang garis pantai Kepulauan Mentawai yang mencapai 1.003 km, total keseluruhan garis pantai menjadi 1.378 km. Selain itu, kawasan perairannya meliputi 375 pulau baik besar maupun kecil.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 19 kabupaten/kota, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan total 179 kecamatan serta 1.160 kelurahan atau nagari. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian utara, Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, Provinsi Bengkulu di selatan, serta langsung berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023 menunjukkan angka sekitar 5,76 juta jiwa. Angka ini merupakan hasil proyeksi dari Sensus Penduduk 2020. Dimana daerah dengan penduduk yang padat berada di Kota Padang dan daerah dengan penduduk paling sedikit berada di Kota Padang Panjang. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari sekitar 2,90 juta jiwa laki-laki dan 2,86 juta jiwa perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa rasio jenis kelamin di Sumatera Barat berada dalam keseimbangan yang relatif baik, dengan jumlah laki-laki hanya sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Budaya Sumatera Barat, yang dikenal dengan budaya Minangkabau, memiliki ciri khas yang unik karena menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini tercermin dalam pembagian harta pusaka, di mana perempuan memiliki peran penting sebagai pewaris utama. Selain itu, adat Minangkabau mengedepankan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang berarti adat istiadat berlandaskan ajaran Islam. Keunikan budaya Minangkabau yang dinamis, sekaligus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. (BPS. Sumbar)

2. Topografi

Sumatera Barat dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keindahan alamnya. Menurut Katalog Profil Daerah Kota Padang (2012: 8), kondisi topografi di Sumatera Barat termasuk dalam kawasan lindung, yang mencakup fungsi hutan lindung dan hutan konservasi. Sekitar 39,08% dari wilayahnya memiliki kemiringan lebih dari 40%, dan letaknya berada pada pertemuan dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia dan Australia, serta berada di dekat patahan Semangka, sehingga keberadaan hutan sangat penting untuk menjaga kestabilan tanah. Dengan topografi seperti ini, potensi sumber daya alam di Sumatera Barat memiliki variasi dalam intensitas serta cara pemanfaatannya. Pada wilayah dataran rendah, penggunaan lahan dapat dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi, sedangkan di daerah dataran tinggi, pemanfaatan lahan akan menghadapi berbagai kendala karena keterbatasan lahan. Agar penggunaan lahan bisa optimal, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap kondisi lahan dan lingkungan terlebih dahulu, guna menghindari kerusakan yang dapat berdampak negatif baik saat ini maupun di masa depan. Sebagian besar dataran tinggi di Sumatera Barat terdiri dari rangkaian perbukitan dan pegunungan, termasuk jajaran Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kemiringan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai pintu gerbang wilayah barat Indonesia, didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, serta pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Secara geologis, provinsi ini termasuk wilayah yang rawan gempa bumi, terutama di sepanjang jalur gunung berapi. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik Pulau Sumatera yang berada di sepanjang Great Sumatra Fault di pesisir barat serta Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai, yang saling berinteraksi dan menyebabkan pergerakan antara lempeng besar dan lempeng mikro. Kondisi tersebut membuat Sumatera Barat rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, serta potensi gelombang tinggi dan tsunami. (DPPPA Sumbar)

3. Geologi

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki struktur geologi yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang terletak di zona pertemuan dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia di bagian utara, yang ditandai dengan adanya pusat aktivitas tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Tumbukan antara kedua lempeng ini memicu munculnya fenomena tektonik lain, seperti busur magmatik yang terlihat dari deretan Pegunungan Bukit Barisan beserta gunung-gunung api yang ada, serta sesar atau patahan besar di Sumatera yang memanjang sejajar dengan zona tumbukan, yakni dari arah utara ke selatan.

Di sisi lain, kondisi geologi ini memberikan manfaat bagi Provinsi Sumatera Barat. Manfaat tersebut meliputi keberadaan mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian, dan lain-lain; serta tanah yang subur dengan banyak sumber air bersih dan air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural yang berdekatan dengan sumber panas bumi akibat magma dangkal. Dengan demikian

Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang ada di wilayah ini meliputi struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, sesuai dengan pola regional di Pulau Sumatera. Struktur utama yang ditemukan adalah Great Sumatera Fault sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai, yang saling berinteraksi sehingga menyebabkan pergerakan antara lempeng besar dan lempeng mikro. Selain itu, di daratan terdapat patahan Semangka yang membentang dari Solok Selatan hingga Pasaman. Kondisi ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi.

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan potensi sumber daya air yang cukup besar, dilihat dari banyaknya sungai dan danau yang ada. Tercatat sekitar 606 sungai di provinsi ini, dengan sebagian bermuara ke Samudra Hindia di Pantai Barat dan sebagian lainnya mengalir ke Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah yang dialiri sungai tersebut terbagi menjadi 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri, dan Masang. Air sungai-sungai ini berasal dari pegunungan serta danau seperti Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau, dan Danau Singkarak. Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar memiliki luas sekitar 13.011 km², sementara Danau Maninjau di Kabupaten Agam seluas 9.950 km². Sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) berada di Kabupaten Solok (BPS. Sumbar)

4. Sejarah Sumatra Barat

Wilayah Sumatera Barat menjadi bagian dari pengaruh kerajaankerajaan besar seperti Sriwijaya, yang menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pada abad ke-14, muncul Kerajaan Pagaruyung, sebuah kerajaan Minangkabau yang berkembang

pesat dan dikenal sebagai pusat budaya, agama, dan pemerintahan di Sumatera Barat. Kerajaan ini menerapkan sistem matrilineal dalam masyarakatnya, yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau hingga saat ini.

Islam mulai masuk ke Sumatera Barat sekitar abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah dari pedagang Gujarat dan Aceh. Islam kemudian diterima secara luas oleh masyarakat dan menjadi elemen utama dalam kehidupan sosial dan adat istiadat Minangkabau, menghasilkan perpaduan unik antara adat dan syariat. Pada abad ke-17 hingga 19, wilayah ini menjadi salah satu fokus kolonialisme Belanda. Perlawanan sengit dari rakyat Sumatera Barat terhadap penjajah ditandai oleh Perang Padri (1821–1837), yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama seperti Tuanku Imam Bonjol. Perang ini mencerminkan konflik internal antara adat dan Islam yang kemudian diselaraskan melalui kesepakatan adat Minangkabau yang selaras dengan ajaran agama. (Kato, 2005)

Pada awal abad ke-20, Sumatera Barat menjadi pusat intelektual dan pergerakan nasional. Banyak tokoh penting dalam sejarah Indonesia berasal dari wilayah ini, seperti Mohammad Hatta (proklamator kemerdekaan), Sutan Syahrir, dan Tan Malaka. Kota Padang Panjang dan Bukittinggi menjadi pusat pendidikan dan kegiatan pergerakan nasional, yang melahirkan para pemikir dan pemimpin yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, munculnya organisasi modern seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam semakin memperkuat kesadaran politik dan keagamaan masyarakat Minangkabau. (Kahin, 2000)

5. Demografis Sumatra Barat

Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat mencapai 4.846.909 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 110 jiwa per kilometer persegi. Kota Padang merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 833.562 jiwa. Sementara itu, Kota Bukittinggi memiliki tingkat

kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas masyarakat Sumatera Barat beretnis Minangkabau, yang keseluruhannya memeluk Islam selain itu terdapat Suku Mentawai yang mayoritas memeluk Agama Kristen.

6. Sosial Budaya di Sumatera Barat

Masyarakat Sumatera Barat memiliki kekayaan sosial budaya yang sangat kental, yang mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dijaga turuntemurun. Salah satu aspek terpenting dari budaya Sumatera Barat adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak ibu. Dalam kehidupan sosial, adat sangat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Masyarakat Minangkabau, yang menjadi mayoritas di provinsi ini, sangat menghormati prinsip adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, yang berarti adat harus berlandaskan pada hukum agama Islam.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh agama Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual tetapi juga sebagai dasar dalam menjalankan berbagai tradisi sosial. Adanya keunikan dan keragaman budaya di Sumatera Barat terus mempertahankan dan melestarikan tradisi sosial budayanya meskipun ada pengaruh modernisasi. Budaya dalam perkawinan, upacara kematian, hari hari besar ke agamaan, menunjukkan masyarakat Sumatera Barat yang bepegang teguh pada tradisi sesuai dengan petuah adat : “Adat tak lakang dek Paneh, tak lapuak dek hujan” yang berarti adat tidak akan hilang walau berganti zaman.(Amir MS, 2003)

7. Pendidikan

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (2024), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)., APM tertinggi di Sumatera Barat tercatat pada jenjang SD/MI, mencapai 98,89 persen. Ini berarti lebih dari 98 persen anak usia 7–12 tahun bersekolah tepat waktu. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk berbagai kelompok umur menunjukkan Kelompok usia 7– 12 tahun memiliki APS tertinggi

dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Selain itu Angka Melek Huruf (AMH) juga terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mencapai 99,71 persen, yang artinya dari 10 penduduk 15–64 tahun di Sumatera Barat, 9 penduduk di antaranya bisa membaca dan menulis. (BPS. Sumbar)

8. Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah daerah Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai ke pelosok. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah fasilitas kesehatan sudah cukup banyak dikutip dari “Sumatera Barat dalam Angka” (BPS 2024), dimana sejak tahun 2023 telah menunjukkan peningkatan dari sebelumnya. Dimana terdapat 50 Rumah Sakit Umum, dan 34.260 tenaga medis yang tersebar di seluruh daerah Sumatera Barat. Dengan Angka Kesakitan 11,84 persen berdasarkan data BPS 2023, dengan didominasi kelompok umur 60 tahun ke atas.

9. Kepariwisata

Bandara Internasional Minangkabau membuka pintu bagi wisatawan domestik bahkan mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat. Para wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Barat berasal dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Australia, Singapura, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Jerman, Jepang, dan India.

Selain itu banyak nya daya tarik wisata di Sumatera Barat yang menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun internasional untuk mengunjungi Sumatera Barat, seperti adanya wisata sejarah seperti Jam Gadang di Bukittinggi, Danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Jalur menuju Danau Maninjau melalui Kelok 44 menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Serta wisata Istano Baso Pagaruyuang yang menjadi lambang kebudayaan masyarakat Minangkabau. (Dinas Pariwisata Sumatera Barat, 2023)

B. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Data dikatakan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$, data tersebut dianggap tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas sampel dilakukan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.38149220
Most Extreme Differences	Absolute	.172
	Positive	.172
	Negative	-.093
Test Statistic		.172
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber Data: Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi distribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,174 yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Oleh karena itu, model ini dianggap sudah normal dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah multikolinearitas dengan cara mengamati nilai VIF

(Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengolahan data terkait hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengangguran Terdidik	.891	1.123
	IPM	.891	1.123

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber Data: Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

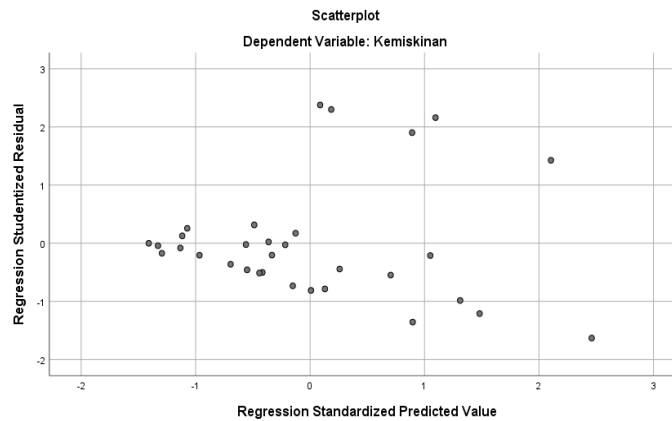
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF untuk Tingkat Pengangguran Terdidik (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2) sama-sama sebesar 1,123, yang mana kurang dari batas 10. Selain itu, nilai tolerance untuk Tingkat Pengangguran Terdidik (X1) dan IPM (X2) masing-masing sebesar 0,891, yang lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk memeriksa apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidakkonsistenan varians residual antar pengamatan. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, kondisi ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varians tersebut berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.

Hasil pengolahan data yang diperoleh dapat dilihat melalui Grafik Scatterplot

Gambar 4. 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber Data: Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan grafik Scatterplot pada tabel di atas, terlihat bahwa titik-titik penyebaran tidak membentuk pola yang teratur dan tersebar di atas serta di bawah nilai nol (0) pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau lokasi. Sebuah model regresi yang ideal seharusnya bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini, digunakan metode uji Durbin-Watson.

Tabel 4. 3
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.321	.273	.30305	1.432
a. Predictors: (Constant), IPM, Pengangguran Terdidik					
b. Dependent Variable: Kemiskinan					

Berdasarkan pengambilan keputusan autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson dapat digunakan ketentuan:

- < 1,10 : terjadi korelasi
- 1,10-1,54 : tidak ada kesimpulan
- 1,55-2,46 : tidak terjadi autokorelasi
- 2,46-2,90 : tidak ada kesimpulan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesimpulan, karena nilai Durbin-Watson sebesar 1,432 menunjukkan posisi di mana autokorelasi tidak ada kesimpulan.

Diketahui:

$N = 32$ dan K (Variabel Independent) = 2

Nilai DL = 1,309

Nilai DU = 1,573

Nilai $4 - DU = 4 - 1,573 = 2,427$

Kesimpulannya nilai Durbin – Watson menunjukkan posisi di tidak ada kesimpulan.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 4
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.483	5.208		3.165	.004
	Pengangguran Terdidik	.424	.192	.332	2.205	.036
	IPM	-3.611	1.171	-.464	-3.085	.004

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber Data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$= 16.483 + .424 X_1 + (-3.611)X_2 + e$$

Dari tabel hasil estimasi di atas, dapat di ketahui persamaan regresi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 16,483 menunjukkan kondisi di mana variabel dependen yaitu kemiskinan bernilai 16,483 jika variabel pengangguran terdidik (X1) dan IPM (X2) bernilai nol
- b. Koefisien regresi untuk variabel pengangguran terdidik (X1) sebesar 0,424 mengidentifikasi bahwa pengangguran terdidik memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya jika variabel independent pengangguran terdidik satu satuan, maka kemiskinan sebagai variabel dependent akan meningkat 0,424.
- c. Koefisien regresi untuk variabel IPM (X2) menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil uji t parsial terhadap variabel Pengangguran Terdidik menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,205 dan nilai signifikan sebesar 0,036. Karena nilai t_{hitung} (2,205) > t_{tabel} (2,045) dan nilai sig (0,036) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Pengangguran Terdidik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, hipotesis nol (H_{01}) ditolak dan hipotesis alternatif (H_{a1}) diterima

Sedangkan hasil uji t parsial terhadap variabel IPM menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -3,085 dengan nilai signifikan sebesar 0,004. Karena nilai t_{hitung} (-3,085) < $-t_{tabel}$ (-2,045) dan nilai sig (0,004) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa IPM juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis nol (H_{02}) ditolak dan hipotesis alternatif (H_{a2}) diterima.

Secara umum, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik jika dilihat secara terpisah maupun bersama-sama. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat perlu difokuskan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi serta perbaikan kualitas pembangunan sumber daya manusia.

3. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinan atau R² bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independent/bebas (modal kerja dan tenaga kerja) terhadap variabel dependen/terikat (pendapatan nelayan) di nagari air bangis kecamatan sungai beremas kabupaten pasaman barat, nilai R² nilai interval anantara 0-1, apabila nilai ini semakin mendekati angka satu berarti variable bebas dapat memprediksi variable terikat lebih besar. Berikut hasil analisis berdasarkan pengujian SPSS sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Uji Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.410	.39443
a. Predictors: (Constant), Pengangguran Terdidik , IPM				
b. Dependent Variable: Kemiskinan				

Sumber Data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, terlihat nilai R yang merupakan symbol koefisien korelasi yaitu nilai yang menunjukkan besar kecilnya hubungan linear antara variable independent dan dependen sebesar 0,410 sehingga hubungan modal kerja dan tenaga kerja dengan hasil pendapatan nelayan sangat kuat dengan hasil Adjusted R Square sebesar 0,410. Sehingga sisanya dijelaskan oleh factor – factor lain di luar variabel yang ada pada penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pengangguran terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara terpisah terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Apabila nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka hipotesis nol (H₀) diterima, sedangkan jika t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis

nol ditolak, berdasarkan nilai signifikan jika nilai signifikan $> \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima, jika tingkat signifikan $< \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.483	5.208		3.165	.004
	Pengangguran Terdidik	.424	.192	.332	2.205	.036
	IPM	-3.611	1.171	-.464	-3.085	.004

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber Data: Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel hasil uji t pada tabel diatas (rekapitulasi hasil) diperoleh nilai t_{hitung} tingkat Pengangguran Terdidik 2.205 dan tingkat Indeks Pembangunan Manusia -3.085 sedangkan t_{hitung} dapat dilihat pada tabel statistic dengan nilai signifikan 0,05 dengan rumus $a/2 ; n-k$. Di peroleh hasil $t_{tabel} (0,05/2;32) (0,025;30) = 2,042$, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tingkat Pengangguran Terdidik Terhadap Kemiskinan

Pengujian pertama dalam penelitian ini untuk menguji apakah tingkat pengangguran terdidik berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat dia atas di peroleh hasil penelitian memnunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} tingkat pengangguran terdidik sebesar 2.205 dan t_{tabel} dengan taraf kepercayaan 0,05 di peroleh hasil t_{tabel} 2.042 ($2.205 > 2.042$), serta di dapatkan nilai signifikan tingkat pengangguran terdidik lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ yaitu 0.036 yaitu $0.036 < 0.05$. Maka didapatkan keputusan bahwa H_0 1 di tolak dan H_{a1} di terima. Artinya secara parsial tingkat pengangguran terdidik berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Barat.

2) Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Pengujian kedua dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada tabel di atas di peroleh hasil bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil ini dibuktikan dengan nilai variabel indeks pembangunan manusia bahwa t_{hitung} sebesar -3.085 nilai lebih kecil dari t_{tabel} 2.042 yaitu $-3.085 < 2.042$ dengan nilai signifikan $0.004 < 0.05$. Karena nilai Sig $0.004 < 0.05$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Jadi dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengambilan keputusan dilakukan dengan menolak hipotesis nol (H_0) apabila nilai f-hitung melebihi nilai f-tabel atau nilai signifikansi berada di bawah $\alpha = 0,05$. Sebaliknya, H_0 diterima jika nilai f-hitung lebih kecil dari f-tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Di bawah ini disajikan hasil tabel ANOVA:

Tabel 4. 7
Uji Signifikan Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.657	2	1.828	11.753	.000 ^b
	Residual	4.512	29	.156		
	Total	8.168	31			
a. Dependent Variable: Kemiskinan						
b. Predictors: (Constant), Pengangguran Terdidik, IPM						

Sumber Data: Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26

Uji Simultan (Uji Statistik f) bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam suatu model penelitian secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel

dependen. Dalam penelitian ini, uji statistik f digunakan untuk menguji apakah variabel independen seperti tingkat pengangguran terdidik dan indeks pembangunan manusia secara simultan memengaruhi variabel dependen, yaitu kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai f-hitung sebesar 11,753, sementara nilai f-tabel dihitung menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan rumus k dan $n-k-1$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai f-tabel dengan derajat kebebasan (2; 29) adalah 3,33. Karena nilai f-hitung sebesar 11,753 lebih besar dari f-tabel 3,33 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yakni Tingkat Pengangguran Terdidik (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X_2), memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terdidik (X_1) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terdidik (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut diketahui dari tingkat signifikan terhadap kemiskinan sebesar $0,036 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikemukakan oleh Gary Becker. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan peluang individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan meningkatnya pendidikan, seharusnya seseorang memiliki kemungkinan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya paradoks. Meskipun tingkat pendidikan penduduk meningkat, sebagaimana tercermin dari nilai IPM yang terus mengalami kenaikan, tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Sumatera Barat tetap relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pendidikan belum sepenuhnya memberikan hasil optimal sebagaimana yang digambarkan dalam teori. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konseptual pengangguran terdidik memang sejalan dengan Teori Modal Manusia, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan belum mencerminkan harapan dari teori tersebut.

Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian Istifaiyah (2015) yang menemukan bahwa pengangguran terdidik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Istifaiyah menjelaskan bahwa tingginya jumlah pengangguran berpendidikan tinggi berpotensi memperbesar angka kemiskinan karena kelompok ini belum mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Penelitian ini sejalan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) Dikembangkan oleh Gary Becker Pendidikan dan keterampilan adalah bentuk investasi pada diri manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Hal ini mendukung temuan di Provinsi Sumatera Barat, di mana tingginya tingkat pengangguran terdidik memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga miskin karena lulusan berpendidikan tinggi gagal terserap dalam dunia kerja

Selain itu, penelitian Febriyanka Lidya dkk (2024) juga membahas hal serupa di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini sejalan dengan Teori Modal Manusia yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi kemiskinan. Namun, ketidaksesuaian antara lulusan terdidik dan kebutuhan pasar kerja menciptakan pengangguran terdidik, yang justru dapat memperburuk kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan ekonomi makro yang melihat

kemiskinan sebagai hasil interaksi berbagai indikator seperti inflasi, IPM, dan pengangguran. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengangguran terdidik menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Namun secara simultan bersama variabel lain, pengangguran terdidik, inflasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini memperlihatkan adanya fenomena antara lulusan pendidikan tinggi dan ketersediaan pekerjaan, yang juga terjadi di Sumatera Barat.

Dalam pandangan Ekonomi Islam, tingginya tingkat pengangguran terdidik merupakan persoalan serius yang perlu segera ditangani karena dapat memperburuk kondisi kemiskinan di masyarakat. Islam menekankan nilai produktivitas, ketekunan, dan kemandirian dalam aspek ekonomi. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Insyirah ayat 7 yang menyatakan, "Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain." Ayat ini mengajak setiap orang untuk senantiasa aktif dan tidak bermalas-malasan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima, mengajarkan pentingnya kemandirian ekonomi agar tidak bergantung pada orang lain dan dapat turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian bahwa dapat diimpulkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Sumatera Barat secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan meliputi penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih aplikatif, perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan sektor industri dan jasa, serta pemberdayaan lulusan perguruan tinggi melalui program pelatihan dan inkubasi bisnis yang mendukung semangat kewirausahaan.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Berbeda dengan variabel lainnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dari IPM terhadap kemiskinan ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_a) diterima. Kesimpulannya, IPM memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan Teori Pembangunan Manusia yang menekankan bahwa pembangunan manusia yang berkualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan pendapatan. Peningkatan pada aspek pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, sedangkan perbaikan kesehatan meningkatkan kapasitas kerja masyarakat. Kombinasi keduanya mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor formal yang berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, walaupun akses pendidikan dan layanan kesehatan telah membaik, ketersediaan lapangan kerja yang layak masih menjadi tantangan besar, sehingga pengaruh IPM terhadap penurunan kemiskinan memerlukan sinergi dengan kebijakan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Ari Kristin Prasetyoningrum (2018) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan memiliki akses terhadap kebutuhan hidup layak cenderung memiliki pendapatan yang lebih baik sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian R. Fadila et al. (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Provinsi Sumatera Barat secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin. Kedua penelitian tersebut mendukung temuan dalam studi ini yang

menegaskan bahwa IPM merupakan faktor penting dalam memutus rantai kemiskinan.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Guspita Sari (2019) di Sumatera Utara, yang menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat di kedua provinsi. Faktor-faktor seperti distribusi pendapatan yang tidak merata dan kualitas infrastruktur juga dapat mempengaruhi hasil hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pembangunan manusia merupakan aspek fundamental yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Islam menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan umat. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 menyebutkan: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memanfaatkan potensi diri untuk kesejahteraan bersama, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Konsep pembangunan manusia dalam Islam mencakup dimensi material dan spiritual agar tercapai kesejahteraan yang menyeluruh.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan IPM di Provinsi Sumatera Barat secara nyata berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah meliputi penyelarasan program pendidikan dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan demikian, peningkatan IPM akan berdampak optimal terhadap pengentasan kemiskinan jika diiringi dengan pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah provinsi.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji F menunjukkan Tingkat Pengangguran Terdidik (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X2), secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, uji f digunakan untuk mengidentifikasi apakah semua variabel independent (Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia) memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent (Kemiskinan) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan nilai signifikan untuk pengaruh pengangguran terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan adalah 0,000 yang berarti kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hal tersebut membuktikan bahwa menolak hipotesis nol H_0 dan menerima hipotesis alternatif H_a .

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikemukakan oleh Gary Becker. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih produktif dan berdaya saing. Namun, jika modal manusia tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai, maka akan terjadi pengangguran yang berpotensi memperburuk kemiskinan. Di Provinsi Sumatera Barat, tingginya pengangguran terdidik menunjukkan adanya kegagalan dalam mengoptimalkan hasil investasi pendidikan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan Teori Pembangunan Manusia yang menyatakan bahwa pembangunan manusia yang berkualitas dapat menekan angka kemiskinan. Peningkatan IPM mencakup perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan memiliki pendapatan yang cukup akan lebih mampu untuk keluar dari garis kemiskinan. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, IPM menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dari 69,98 pada tahun 2015 menjadi 75,64 pada tahun 2023. Tren

kenaikan IPM ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan meskipun secara bertahap, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia berperan penting dalam pengentasan kemiskinan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ari Kristin Prasetyoningrum (2018) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini juga didukung oleh penelitian R. Fadila et al. (2020) yang menyebutkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat, peningkatan IPM secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, penelitian Istifaiyah (2015) menunjukkan bahwa pengangguran terdidik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, yang memperkuat hasil penelitian ini.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Oktaviana et al. (2021) yang menyatakan bahwa pengangguran terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh faktor lokal, seperti adanya lapangan kerja informal dan program bantuan sosial yang dapat menahan dampak langsung pengangguran terhadap kemiskinan di wilayah penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengangguran Terdidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, yang dibuktikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Secara parsial, Pengangguran Terdidik (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji t sebesar 2,205 dan nilai signifikansi (sig.) 0,036 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan pada pengangguran terdidik akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan.
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2) terhadap Kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan uji t sebesar -3.085 dan nilai signifikansi (sig.) $0.004 < (0.05)$. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Pengangguran Terdidik (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Bukti dari hal ini adalah nilai F-hitung sebesar 11,753 yang melebihi nilai F-tabel sebesar 3,32, serta nilai signifikansi 0,000 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian, kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terdidik yang menjadi salah satu faktor signifikan penyebab kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas peluang kerja melalui pengembangan sektor industri kreatif, teknologi, dan ekonomi berbasis lokal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada generasi muda, misalnya program *entrepreneurship* untuk lulusan perguruan tinggi sehingga mereka tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja baru.

2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Upaya meningkatkan IPM harus terus ditingkatkan dengan memastikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Pemerintah juga dapat menyusun program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan keterampilan (*reskilling* dan *upskilling*) yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Selain itu, perbaikan kualitas layanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, sehingga berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan.

3. Dalam pandangan Islam, kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga zakat harus mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar distribusi kekayaan berjalan lebih merata. Program-program pemberdayaan ekonomi umat seperti pembiayaan syariah (*microfinance*) dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah juga penting untuk membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Etos kerja Islami harus terus ditanamkan kepada

generasi muda agar mereka memiliki semangat kemandirian dan produktivitas tinggi sesuai dengan ajaran Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian berikutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau investasi sebagai faktor yang juga berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian mendatang juga bisa menggunakan metode campuran (*mixed methods*) agar mampu menggali lebih dalam fenomena pengangguran terdidik dan kemiskinan tidak hanya dari sisi angka statistik tetapi juga kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, memperluas lokasi penelitian ke provinsi lain dapat memperkaya hasil studi komparatif dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, J. P. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis* 5, 69.
- Amir MS. (2003). *Adat Minangkabau*. Mutiara Sumber Widya.
- Aprianto. (2017). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, Volume* 8(No 2).
- Azwar Karim, A. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. (2015).
- Budiantara, A. P. S. dan I. N. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(1), 37.
- Conway, E. (2015). *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*. Erlangga.
- D, A. (2014). Transformasi Modal Manusia dalam Era Artificial Intelligence. *Jurnal Maeswara*, 4(1).
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Fekon*, 4(1).
- Dinas Pariwisata Sumatera Barat. (2023). *Profil Kepariwisataaan Sumatera Barat*.
- Farah, E. puspita sari & A. (2014). Modal manusia dan Produktivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(1).
- Fatmawati, D. (2022). *Analisis Masalah Kemiskinan dan Kebijakan Sosial (Putra Adi Syani (ed.); 1st ed.)*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Fitriyanto, D. (2024). Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Wilayah Mataraman Jawa Timur ditinjau dari Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 13*(Nomor 2).
- Hera Susanti, M. I. dan W. (2002). *Indikator-indikator Makro Ekonomi*.
- Imam, G. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, 2(1).

- Kadir. (2015). *Statistika Konsep, Contoh dan Nalisa Data Dengan Program SPSS*. Rajawali Pers, 2014.
- Kahin, G. M. (2000). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Khomsam Ali. (2015). *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestari. (2017). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011 2015*.
- Lestari, D. (2015). *Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*. FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo,.
- Lidya, F., Hanum, N., Andiny, P., Studi, P., Pembangunan, E., & Samudra, U. (2024). *Pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia (ipm) dan pengangguran terdidik terhadap kemiskinan Di kota lhokseumawe*. 5(9), 658–665.
- Meri Rahmania. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*, 119.
- Nabila, S. (2018). *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terdidik dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kota Bandar Lampung Tahun 2007–2017)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/4929/>
- Priyatno, D. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. In *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*.
- Puspasari. (2019). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Terdidik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Perspektif Modal Manusia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 194–209.
- Putra, W. (2019). *Perekonomian Indonesia*. Rajawali Pers.

- Putri. (2015). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2).
- Qardhawi, Y. A. (2002). *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa.
- S. Mulyadi. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suku bangsa, D. (2013). Pemberdayaan Warga Selaku Usaha Pengentasan Kemiskinan. *Harian Socius*, 14(Okttober-Desember).
- Supit, Q. rena V. . F. . (n.d.). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(10).
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional*. Bumi Aksara.
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi (11th ed.)*. Erlangga.
- UNDP HDR. (2010). *Dasar Konsep IPM dan Perkembangan Pendekatan Multidimensional*.